

Rancangan Program Penguatan Akses Pendidikan melalui Pendekatan *Participatory Rural Appraisal* di Desa Pamubulan Banten

Chamiyatus Sidqiyah¹, Nunung Khoiriyah², Qisthy Muzdalifah^{*3}, Putri Ramadhani⁴

Kesejahteraan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*e-mail: chamiyatus@uinjkt.ac.id¹, nunung.khoiriyah@uinjkt.ac.id²,
qisthymuzdalifah@gmail.com³ putriramadhani1928@gmail.com⁴.

Abstrak

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, namun kesenjangan akses pendidikan masih menjadi permasalahan di Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Pengabdian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan dan merumuskan strategi penguatan akses pendidikan berbasis partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA) melalui teknik pohon masalah dan matriks ranking melibatkan 25 peserta dari unsur pemuda, guru, dan perangkat desa. Hasil menunjukkan tiga hambatan utama yaitu keterbatasan ekonomi (72%), minimnya fasilitas belajar (64%), dan rendahnya akses informasi pendidikan (60%). Sementara itu, motivasi pemuda (80%), dukungan keluarga (68%), dan peran guru (56%) menjadi faktor pendukung. Kegiatan ini menghasilkan tiga rekomendasi program prioritas, yaitu pembentukan pusat informasi pendidikan desa, pelatihan akses beasiswa bagi pemuda, dan usulan alokasi anggaran pendidikan pada APBDes 2025. Kegiatan PRA memberikan kontribusi nyata dalam membuka ruang partisipasi masyarakat serta menghasilkan rencana aksi yang disepakati bersama untuk memperluas akses pendidikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Akses Pendidikan, Desa, Partisipasi Masyarakat, PRA, Pemerataan Pendidikan

Abstract

Education is a basic right of every citizen, yet access inequality remains a critical issue in Pamubulan Village, Bayah Subdistrict, Lebak Regency. This community engagement aims to identify barriers and formulate strategies to strengthen educational access based on community participation. The method applied was Participatory Rural Appraisal (PRA) using problem tree analysis and ranking matrix with 25 participants involving youth groups, teachers, and village officials. The results indicate three main barriers: economic constraints (72%), limited learning facilities (64%), and lack of educational information access (60%). Meanwhile, youth motivation (80%), family support (68%), and teacher involvement (56%) serve as supporting factors. The activity produced three priority programs: establishing a village education information center, scholarship access training for youth, and proposing education budget allocation in the 2025 Village Budget. PRA contributed to enhancing community participation and generating a jointly agreed action plan to improve educational access sustainably.

Keywords: Educational Access, Rural Areas, Community Participation, PRA, Educational Equity

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, pendidikan merupakan salah satu hak dasar warga negara dan kunci dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi masalah serius dalam upaya pemerataan pendidikan terutama di wilayah desa yang menghadapi keterbatasan fasilitas belajar, sumber informasi dan dukungan kebijakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah mencapai 99,19 persen untuk kelompok usia 7–12 tahun, namun menurun menjadi 96,17 persen pada usia 13–15 tahun dan pada usia 16–18 tahun juga mengalami penurunan

menjadi 74,64 persen, dan hanya 29,01 persen pada usia 19–23 tahun. Penurunan partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi menegaskan bahwa hambatan biaya, jarak, serta ketimpangan pembangunan pendidikan menjadi faktor utama sulitnya akses pendidikan khususnya di wilayah pedesaan.

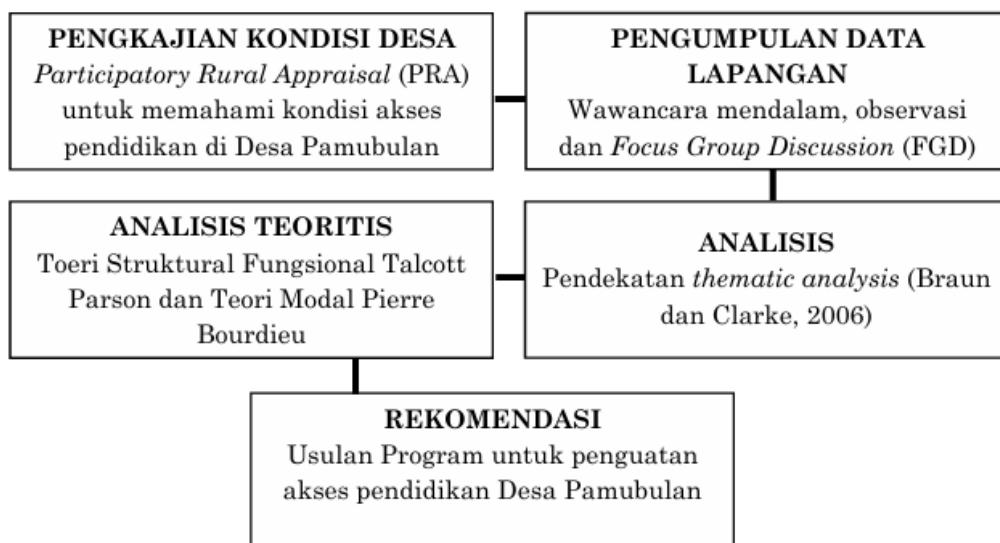
Kondisi serupa terjadi di Desa Pamubulan Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pelaksanaan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) bersama kelompok masyarakat Gerakan Muda Pamubulan diperoleh data sedikitnya 20 pemuda desa memiliki minat melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi namun terkendala oleh biaya, fasilitas belajar, dan keterbatasan informasi mengenai peluang pendidikan. Temuan ini sejalan dengan beberapa artikel pengabdian di wilayah pedesaan lain yang menunjukkan bahwa hambatan biaya, akses informasi, dan rendahnya dukungan kelembagaan merupakan faktor utama menurunnya peluang pendidikan bagi pemuda desa, sehingga penguatan partisipasi masyarakat menjadi strategi yang efektif dalam membuka akses pendidikan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan lebih banyak didorong oleh inisiatif komunitas bukan melalui dukungan struktural. Selain itu, beberapa pengabdian berbasis PRA juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat desa dan menghasilkan strategi pendidikan yang lebih relevan dengan konteks lokal. Hal serupa terlihat di Desa Pamubulan, beberapa pemuda yang telah menempuh pendidikan tinggi juga menghadapi ketidaksesuaian antara jurusan yang dipilih dengan kebutuhan lapangan kerja di lingkungan sekitar sehingga banyak lulusan mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah akses pendidikan dan relevansi pendidikan di Desa Pamubulan nyata dan mendesak untuk ditangani sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan.

Secara kebijakan, pemerintah telah menyediakan berbagai instrumen untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), merdeka belajar, hingga pemanfaatan dana desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Alokasi Dana Desa Pamubulan belum secara khusus diarahkan untuk penguatan pendidikan dan kegiatan sosialisasi program pendidikan masih terbatas. Kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik lokal inilah yang membuat pengabdian ini relevan untuk menggali hambatan akses pendidikan berbasis partisipasi masyarakat dalam merancang strategi pemerataan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Penelitian Wahyudi (2023) mengenai Peran Pemerintahan Desa Dalam Mendukung Pendidikan Anak-Anak Desa Terpencil yang menunjukkan bahwa pemerintah desa di wilayah terpencil berperan sebagai motivator, mobilisator, dan fasilitator dalam mendukung pendidikan, terutama dalam menekan angka putus sekolah. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada persoalan pendidikan secara umum di desa kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sementara isu spesifik mengenai akses pendidikan dan strategi penguatan pendidikan berbasis partisipasi masyarakat belum dibahas secara mendalam. Selain itu pendekatan yang digunakan masih bersifat deskriptif dan belum melibatkan partisipasi aktif warga dalam menggali permasalahan maupun merancang solusi. Artikel ini berkontribusi pada model penguatan pendidikan dengan menghadirkan pendekatan PRA untuk identifikasi masalah dan penentuan prioritas program secara partisipatif. Kontribusi utama terletak pada usulan program yang dapat diadopsi pemerintah desa melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta untuk memperluas akses pendidikan secara berkelanjutan.

2. METODE

Pengabdian ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama yang saling terkait, dimulai dari pengkajian kondisi desa menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk memetakan hambatan dan peluang akses pendidikan di Desa Pamubulan secara partisipatif. Temuan awal kemudian diperdalam melalui pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi sosial, dan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan pemuda, orang tua, guru, dan perangkat desa. Data yang diperoleh dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu analisis teoretis menggunakan kerangka Struktural Fungsional Talcott Parsons dan Teori Modal Pierre Bourdieu untuk memahami dinamika sistem sosial desa, serta thematic analysis (Braun dan Clarke 2006) untuk mengidentifikasi pola hambatan dan faktor pendukung akses pendidikan. Hasil analisis selanjutnya menjadi dasar penyusunan rekomendasi program penguatan akses pendidikan yang disusun bersama masyarakat sebagai luaran utama pengabdian. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang di lakukan di Desa Pamubulan memiliki tahapan sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Pengabdian

Pengabdian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus Tahun 2025 di Desa Pamubulan Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara dan observasi lingkungan. Partisipan pengabdian dipilih sesuai dengan kriteria yang relevan dengan isu yakni melibatkan pemuda desa, orang tua/wali, guru, perangkat desa, dan informan kunci lain yang berhubungan langsung dengan pendidikan di Desa Pamubulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan akses pendidikan di Desa Pamubulan yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah desa, sekolah, keluarga, hingga masyarakat. Hasil analisis menggunakan teknik *matriks ranking* menunjukkan bagaimana masyarakat Desa Pamubulan memprioritaskan permasalahan utama dalam akses pendidikan melalui pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dalam hal ini masyarakat dilibatkan untuk turut serta memberikan penilaian pada setiap permasalahan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan di desa. Berikut pelaksanaan *participatory rural appraisal* (PRA) dalam pengabdian ini :



Gambar 2. Pelaksanaan *Participatory Rural Appraisal*

Berdasarkan pelaksanaan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) diperoleh beberapa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat terkait akses pendidikan di Desa Pamubulan. Permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi dan diberi skor berdasarkan tingkat urgensi serta dampaknya terhadap keberlangsungan pendidikan anak menggunakan Teknik *Matriks Rangking*. Hasil penilaian ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Metode PRA Matriks Ranking

Permasalahan	Skors	Ranking
Dukungan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan	95	1
Sarana dan Prasarana Pendidikan yang tidak memadai	72	4
Peran Orang Tua dan Dukungan Orang Tua	73	3
Sinergi antar Lembaga	81	2

Dari hasil *matriks ranking* menunjukkan bahwa dukungan beasiswa dan bantuan pendidikan menempati peringkat pertama dengan skor tertinggi (95) hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan bantuan finansial menjadi prioritas utama bagi masyarakat karena sebagian besar keluarga belum mampu memenuhi biaya pendidikan anak secara mandiri. Di posisi kedua terdapat sinergi antar lembaga (81) yang mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pihak sekolah, lembaga sosial, dan pemerintah dalam menciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan. Peringkat ketiga adalah peran dan dukungan orang tua (73) yang menandakan bahwa keterlibatan keluarga masih perlu ditingkatkan dalam mendampingi proses belajar anak di rumah maupun di sekolah. Sementara itu, sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai menempati peringkat keempat (skor 72) yang menunjukkan bahwa meskipun kondisi fisik sekolah menjadi perhatian masyarakat menilai aspek dukungan sosial dan ekonomi lebih mendesak untuk segera ditangani.

Setelah memperoleh hasil dari proses *Participatory Rural Appraisal* (PRA), peneliti melakukan triangulasi data dengan wawancara dan diskusi bersama Masyarakat. Hasil triangulasi ini memperkuat temuan peneliti bahwa perluasan akses pendidikan dipengaruhi oleh faktor penghambat dan pendukung yang saling berkaitan, baik dari sisi kebijakan, fasilitas, kondisi ekonomi, maupun motivasi individu. Peneliti mempermudah temuan menggunakan *thematic analysis* untuk mengidentifikasi pola makna (*themes*) yang muncul dari narasi masyarakat terkait hambatan dan dukungan akses pendidikan di Desa Pamubulan

Faktor penghambat Akses Pendidikan

Akses pendidikan di Desa Pamubulan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan dan ketersediaan program, tetapi juga oleh keterbatasan fasilitas pendidikan serta kondisi ekonomi keluarga. Hambatan-hambatan tersebut saling terkait dan membentuk pola ketidaksetaraan akses pendidikan di Desa Pamubulan. Hambatan ini dapat dikategorikan menjadi tiga dimensi utama yaitu hambatan struktural, hambatan fasilitas, dan hambatan ekonomi.

1. Hambatan Struktural

Hambatan struktural berkaitan dengan ketiadaan dukungan kebijakan dan lemahnya tata kelola pendidikan di tingkat desa. Dari hasil *Participatory Rural Appraisal* dapat diketahui bahwa dana pendidikan tidak tersedia secara formal dalam alokasi anggaran desa, sehingga siswa hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pihak swasta. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang menjadi guru SD di Desa Pamubulan terkait tidak adanya alokasi dana untuk beasiswa sebagai berikut “*Tidak ada, sama sekali tidak ada. Baru dari pihak Cemindo, ada juga dari pemerintah lewat PIP, tapi kalau dari desa belum ada*” (Guru SD, 45 tahun). Minimnya alokasi dana desa menunjukkan bahwa pendidikan belum menjadi prioritas utama. Hal ini memperlihatkan kurangnya visi pemerintah desa dalam memastikan keberlanjutan akses pendidikan, serta terbatasnya koordinasi dengan pihak sekolah maupun lembaga eksternal.

2. Hambatan Fasilitas

Selain kendala struktural, keterbatasan fasilitas juga menjadi faktor penting yang membatasi kualitas dan pemerataan pendidikan. Kondisi sarana prasarana sekolah tidak mendukung proses belajar yang optimal, terutama dengan ruang kelas yang tidak memadai dan jumlah siswa yang berlebihan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang menjadi guru SD di Desa Pamubulan terkait kondisi fasilitas di sekolah sebagai berikut “*Ruang kelas kita sempit sekali. Anak-anak jadi mudah terdistraksi, apalagi kalau panas. Kadang ada 40 lebih siswa dalam satu ruangan*”(Guru SD, 38 tahun). Akibat dari keterbatasan fasilitas dasar, seperti ruang belajar, sarana olahraga, dan ketersediaan buku, membuat siswa sulit memperoleh pengalaman belajar yang kondusif. Dalam melihat hambatan ini masyarakat merasakan kesenjangan antara sekolah di desa dan di perkotaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Azzahra (2025) minimnya fasilitas sekolah, seperti ruang kelas yang rusak, atap bocor, meja dan kursi yang sudah tidak layak, hingga keterbatasan toilet dan laboratorium, menghambat proses belajar-mengajar. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas secara tidak langsung mempengaruhi kualitas pendidikan.

3. Hambatan Ekonomi

Masyarakat Pamubulan yang sebagian adalah buruh tani merasakan faktor ekonomi menjadi hambatan paling dominan yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan. Keterbatasan finansial keluarga membuat banyak anak sulit memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seperti biaya sekolah, transportasi, hingga perlengkapan belajar (Edo 2024). Dari hasil wawancara dengan pihak tenaga pendidik, peneliti memperoleh informasi bahwa sebagian besar orang tua tidak mampu membiayai sekolah anak hingga jenjang lebih tinggi sehingga setelah lulus SMP atau SMK sebagian siswa langsung bekerja. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang menjadi Kepala Sekolah SMK di Desa Pamubulan terkait tidak adanya alokasi dana untuk beasiswa sebagai berikut “*Faktor ekonomi sangat berpengaruh ya terhadap keputusan siswa... rata-rata siswa yang sekolah di SMK PGRI Bayah ini kebanyakan kurang mampu... makanya lulusannya jarang ada yang melanjutkan*” (Kepala Sekolah

SMK, 50 tahun). Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah pendidikan juga berkaitan dengan beban ekonomi rumah tangga.

Faktor Pendukung Akses Pendidikan

Ketersediaan akses pendidikan di Desa Pamubulan tidak hanya bersumber dari kebijakan formal atau bantuan eksternal, tetapi juga tumbuh dari kekuatan internal masyarakat yang berperan dalam menjaga keberlanjutan proses belajar. Dukungan tersebut saling terkait dan membentuk memperkuat fondasi pendidikan di tingkat lokal. Dukungan akses pendidikan ini dapat dikategorikan menjadi tiga dimensi utama, yaitu motivasi peserta didik, dukungan keluarga dan dukungan guru.

1. Motivasi Peserta Didik

Motivasi peserta didik dalam mengakses pendidikan merupakan aspek fundamental yang sangat menentukan keberhasilan proses belajar, terutama pada tingkat sekolah dasar. Motivasi tidak hanya dipandang sebagai dorongan untuk meraih prestasi akademik semata, tetapi juga menjadi kunci terbentuknya sikap positif terhadap belajar, ketekunan, serta kreativitas peserta didik. Tanpa motivasi, proses pembelajaran cenderung berjalan monoton, siswa kurang aktif, dan hasil belajar sulit berkembang secara optimal. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, motivasi siswa untuk tetap bersekolah tergolong tinggi (Rahman dkk. 2024). Seperti yang disampaikan dari salah satu tenaga pendidik di Desa Pamubulan *“Anak tetap semangat sekolah walau tidak mampu”*(Guru, 38 tahun).

2. Dukungan Keluarga

Keluarga memiliki peran yang tidak kalah penting, mengingat keluarga memegang berbagai fungsi, seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, ekonomi, dan pembinaan lingkungan (Novita 2025). Dalam hal penguatan akses pendidikan di Desa Pamubulan, masyarakat sepakat bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mendukung akses pendidikan. Hal ini tergambar dari pengalaman seorang mahasiswa yang menyampaikan *“Orang tua sangat berperan besar... dukungan moral mereka selalu memberikan motivasi, dan secara finansial mereka berusaha membiayai kebutuhan kuliah walaupun ekonomi terbatas”* (Mahasiswa, 22 tahun). Dukungan orang tua ini terbukti sangat memberikan semangat moral, meskipun seringkali disertai pengorbanan di tengah keterbatasan ekonomi keluarga.

3. Dukungan Guru

Peran tenaga pengajar juga aspek strategis dalam mendukung keberlanjutan pendidikan, terutama di Desa Pamubulan. Guru berperan dalam memperluas akses pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran dan penerapan strategi yang inovatif dan efektif bagi semua peserta didik (Annur 2024). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK di Desa Pamubulan *“rata-rata setelah lulus langsung mencari kerja, meskipun dari pihak sekolah suka memberikan motivasi kepada siswa... jarang ada yang melanjutkan”*. Hal ini menunjukkan adanya tantangan struktural berupa hambatan ekonomi, namun guru tetap berusaha memberikan dorongan bagi siswa untuk mempertimbangkan peluang pendidikan lanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulana (2022) yang menekankan pentingnya peran pendampingan akademik spiritual dalam menjaga motivasi siswa agar tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga didukung secara emosional dan moral.

Temuan mengenai faktor penghambat dan pendukung akses pendidikan di Desa Pamubulan sejalan dengan Teori modal Pierre Bourdieu yang menekankan bahwa penguatan akses pendidikan juga dapat didukung dengan habitus, modal, dan ranah.

Ketiga elemen tersebut membentuk struktur sosial yang mengubah posisi individu dalam masyarakat. Teori modal Pierre Bourdieu melihat sisi *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) dari tiap komponen untuk membantu memahami sejauh mana masyarakat mampu mengelola sumber daya untuk memperkuat akses pendidikan (Bourdieu 1990). Hal ini tergambar dalam tabel analisis dibawah ini.

Tabel 2. Analisis Kekuatan dan Kelemahan (Pierre Bourdieu)

Komponen	Strength	Weakness	Dampak Sosial
Habitus	Masyarakat memiliki pola hidup yang adaptif dan solidaritas sosial yang kuat, nilai gotong royong masih menjadi landasan tindakan kolektif	Habitus belajar dan reflektif masih rendah, pendidikan belum dianggap sebagai sarana peningkatan posisi sosial	Habitus yang kuat secara sosial tetapi lemah secara kognitif membuat masyarakat lebih mudah bertahan dalam struktur yang ada dan sulit melakukan inovasi
Modal	Tersedia potensi jaringan sosial lokal seperti guru, tokoh masyarakat, perangkat desa dan dukungan dari pihak eksternal seperti CRS	Keterbatasan dana pendidikan, rendahnya literasi dan minimnya prestise terhadap pendidikan tinggi	Ketimpangan distribusi modal menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat mengonversi modal sosial menjadi keuntungan simbolik, sehingga perbedaan posisi sosial semakin lebar
Ranah	Tersedia potensi kolaboratif antara masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah desa dan CSR	Ranah didominasi oleh pihak yang memiliki ekonomi lebih tinggi	Ranah menjadi ruang reproduksi struktur sosial kelompok bermodal kuat mempertahankan posisinya sementara kelompok bermodal lemah sulit berkompetisi secara setara

Sesuai tabel analisis diatas hambatan akses pendidikan di Desa Pamubulan dapat dipahami melalui analisis habitus, modal dan ranah yang dimiliki masyarakat (Bourdieu 1990). Kekuatan utama masyarakat terletak pada aspek solidaritas sosial sedangkan kelemahannya tampak pada keterbatasan modal ekonomi dan budaya yang menghambat perubahan habitus menuju pola berpikir progresif. Ketimpangan tersebut memengaruhi struktur ranah sosial, di mana akses terhadap peluang pendidikan dan sumber daya masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok dengan modal lebih besar. Tidak hanya itu keterbatasan modal budaya berupa rendahnya literasi informasi, fasilitas sekolah yang minim, serta habitus belajar yang kurang terbangun, sementara dari aspek modal sosial terlihat dari minimnya jejaring antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan pihak swasta sehingga akses pendidikan tidak merata. Kedua modal ini turut mempersempit peluang generasi muda untuk melanjutkan pendidikan (Basori dkk. 2024).

Untuk memperkuat temuan, peneliti menganalisis hasil dengan konsep AGIL Teori struktural fungsional Talcott Parsons (Parson 1937). Konsep ini memperlihatkan bagaimana peranan dari berbagai lapisan masyarakat dapat memperkuat akses pendidikan dan bentuk masalah yang dikaji masyarakat dalam *Participatory Rural*

Appraisal (PRA) juga diperjelas dengan konsep AGIL teori struktural fungsional Talcott Parsons. Hal ini tergambar dalam tabel analisis dibawah ini.

Tabel 3. Analisis konsep AGIL (Talcott Parsons)

Fungsi AGIL	Peranan	Hasil Lapangan	Bentuk Disfungsi
<i>Adaptation</i> (A)	Sekolah memberikan fasilitas	Kelas padat, internet terbatas	Siswa sulit mengembangkan kemampuan akademik
<i>Goal Attainment</i> (G)	Pemerintah desa memberikan program beasiswa	Tidak ada alokasi dana desa untuk beasiswa	Tujuan peningkatan akses pendidikan tidak tercapai
<i>Integration</i> (I)	Kerjasama Sekolah, Keluarga, Desa, Universitas	Kurangnya kerjasama desa dan kampus	Kurangnya sinergi antar lembaga pendidikan
<i>Latency</i> (L)	Dukungan Keluarga, Guru	Siswa tetap termotivasi walau ekonomi lemah	Nilai pendidikan bertahan namun rawan runtuh karena hambatan ekonomi

Dalam konteks pengabdian ini, pemerintah desa, sekolah, keluarga, serta lembaga eksternal seperti perusahaan dan pemerintah daerah seharusnya menjadi subsistem yang berfungsi mendukung keberlangsungan pendidikan. Namun, lemahnya peran pemerintah desa dalam mengalokasikan dana untuk pendidikan, sebagaimana terungkap dari pernyataan guru bahwa “*Apakah Dana Desa ada yang dialokasikan ke beasiswa? Tidak ada, sama sekali tidak ada*” menunjukkan adanya disfungsi struktural yang menghambat integrasi sistem sosial pendidikan di tingkat lokal. Selain itu, keterbatasan fasilitas yang tidak memadai membuat siswa sulit beradaptasi dengan tuntutan belajar, sehingga menurunkan kualitas hasil pendidikan. Hambatan ekonomi keluarga juga memperlihatkan keterbatasan sistem dalam memenuhi fungsi integrasi dan pencapaian tujuan. Kepala sekolah menyatakan bahwa “*faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap keputusan siswa... rata-rata siswa SMK PGRI Bayah ini kebanyakan kurang mampu, makanya jarang ada yang melanjutkan*”. Akibatnya, banyak siswa yang lebih memilih langsung bekerja setelah lulus sekolah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketidakmampuan sistem sosial dalam menyediakan mekanisme distribusi sumber daya yang merata.

Usulan Program Penguatan Akses Pendidikan

Dari hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui proses partisipatif bersama masyarakat, khususnya melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk secara langsung mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, serta potensi yang dimiliki dalam memperluas akses pendidikan di wilayahnya. Berikut usulan program penguatan akses pendidikan di Desa Pamubulan yang peneliti susun secara partisipatif bersama masyarakat.

1. Sosialisasi Beasiswa dan Pembuatan *Curriculum Vitae* (CV)

Pembuatan program sosialisasi beasiswa dan pelatihan pembuatan *Curriculum Vitae* (CV) merupakan hasil dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses FGD yang dilakukan di Desa Pamubulan. Melalui diskusi tersebut, masyarakat, terutama kalangan

pelajar dan orang tua mengidentifikasi bahwa salah satu kendala utama dalam melanjutkan pendidikan adalah kurangnya informasi mengenai peluang beasiswa serta keterbatasan kemampuan dalam menyiapkan dokumen administrasi pendidikan atau kerja. Berdasarkan kebutuhan tersebut program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas peserta didik dalam mengakses berbagai peluang pendidikan dan pelatihan lanjutan.

Kegiatan ini mencakup dua fokus utama. Pertama, sosialisasi beasiswa, yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis beasiswa, persyaratan pendaftaran, dan strategi dalam proses seleksi. Kedua, pelatihan pembuatan CV, yang memberikan keterampilan praktis bagi siswa tingkat akhir agar mampu menyusun profil diri secara profesional baik untuk keperluan melamar beasiswa maupun pekerjaan.



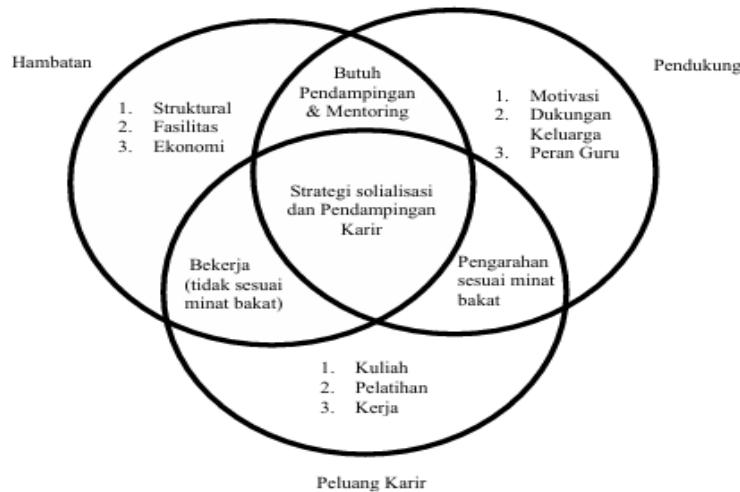
Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Beasiswa dan Pembuatan CV

2. Pemetaan Karir

Alternatif usulan program yang dikembangkan berdasarkan hasil *Participatory Rural Appraisal* (PRA) usulan penguatan akses pendidikan berupa tidak hanya difokuskan pada peningkatan ketersediaan layanan pendidikan tetapi juga diarahkan pada pengembangan potensi dan minat peserta didik agar mereka memiliki arah karir yang jelas sesuai dengan kemampuan dan karakteristik pribadinya. Oleh karena itu, program penguatan akses pendidikan perlu diintegrasikan dengan kegiatan pemetaan karir berbasis teori *Holland's Vocational Personality Types* atau *Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional*. (Holland 1997 dalam Gottfredson & Johnstun 2009)

Analisis RIASEC sebagaimana menurut Holland di atas, pada konteks penguatan akses pendidikan dapat dipahami sebagai ranah *Realistic*, dimana penguatan akses pendidikan menekankan keterlibatan langsung dalam kegiatan praktis dan aplikatif seperti pelatihan vokasional yang membekali siswa dengan keterampilan nyata. Pada ranah *Investigative* mendorong kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menelusuri penyebab ketimpangan akses pendidikan serta menemukan solusi berbasis riset. Pada ranah *Artistic* tercermin dalam upaya menciptakan inovasi pembelajaran kreatif dan inklusif yang menyesuaikan dengan keragaman peserta didik. Sementara itu, pada ranah *Social* berfokus pada empati dan komitmen dalam membantu kelompok rentan agar memperoleh kesempatan belajar yang setara. Pada ranah *Enterprising* menonjol melalui peran kepemimpinan dan advokasi kebijakan pendidikan yang memperluas jangkauan akses secara strategis. Terakhir, pada ranah *Conventional* menegaskan pentingnya tata kelola pendidikan yang tertib, administratif, dan terukur

guna menjamin keberlanjutan program penguatan akses. Dalam hal ini pemetaan karir di Desa Pamubulan tergambar dalam *diagram venn* dibawah ini



Gambar 4. Pemetaan Karir Desa Pamubulan

Penguatan akses pendidikan sebagai perwujudan pemerataan pendidikan seperti kesempatan belajar, melalui pemanfaatan teknologi seperti perpustakaan digital dan pelatihan literasi, masyarakat desa dapat mengakses pengetahuan tanpa hambatan. Upaya ini memperkuat sumber daya manusia dan membuka peluang peningkatan kapabilitas di era digital (Setiawan 2024). Program pendidikan di Desa Pamubulan harus dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus membangun sumber daya manusia desa.

Selain itu dalam pemerataan akses pendidikan, optimalisasi sumber pendanaan lokal menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan pendidikan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa dana desa berkontribusi pada penyediaan sarana prasarana pendidikan, insentif tenaga pendidik, hingga dukungan biaya operasional bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun realisasinya sering kali tidak seimbang karena sebagian besar anggaran masih terserap pada pembangunan fisik dan kebutuhan administratif, sementara alokasi untuk pendidikan belum menjadi prioritas utama (Maulana dkk. 2022.). Pelaksanaan kegiatan pemetaan pendanaan menunjukkan bahwa aparat desa mulai mengidentifikasi potensi sinergi program CSR untuk memperluas cakupan beasiswa dan pelatihan literasi digital. Padahal, sesuai amanat konstitusi, anggaran pendidikan secara nasional minimal 20% dari APBN/APBD, sehingga desa juga idealnya mengadopsi porsi yang proporsional. Pengalaman implementasi di berbagai desa menunjukkan bahwa ketika alokasi dana diarahkan lebih terukur untuk pendidikan, dampaknya signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat (Dewi 2020). Sinergi alokasi Dana Desa dengan dana CSR PT Cemindo Gemilang sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2012, serta UU No. 25 Tahun 2007 membuka peluang strategis dalam memperluas akses beasiswa, pembinaan minat bakat, dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, pendidikan di Desa Pamubulan dapat ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang menjamin keberlanjutan generasi muda secara lebih inklusif dan berdaya saing.

4. KESIMPULAN

Pengabdian mengenai penguatan akses pendidikan di Desa Pamubulan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat utama dalam pemerataan

pendidikan, antara lain hambatan stuktural, hambatan fasilitas dan hambatan ekonomi. Meskipun secara normatif kebijakan nasional telah menjamin hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan yang layak, realitas di tingkat lokal memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penerapannya. Di sisi lain, pengabdian ini juga menemukan faktor pendukung penguatan akses pendidikan, yaitu adanya motivasi peserta didik, dukungan keluarga dan dukungan guru. Kekuatan sosial inilah yang menjadi modal dasar dalam mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, pengabdian ini merekomendasikan perlunya program penguatan akses pendidikan di Desa Pamubulan yang dirancang secara partisipatif melalui metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Program tersebut dapat diarahkan pada peningkatan akses informasi beasiswa, penyediaan ruang belajar desa berbasis komunitas, kemitraan dengan perguruan tinggi untuk pengembangan kapasitas pemuda desa, serta penguatan dukungan kelembagaan desa melalui alokasi anggaran pendidikan yang lebih jelas. Pengabdian selanjutnya perlu mengembangkan model kolaboratif antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan sektor swasta guna membangun program akses pendidikan berkelanjutan sesuai potensi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zahra, J., et.al. (2025). Dampak Infrastruktur Terhadap Pendidikan di Perkampungan (Studi Kasus di Desa Sugarang Bayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun). *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2(4), pp.6957-6964. Available at : <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Basori, B., et.al (2024). Jembatan Impian : Sosialisasi Pentingnya Pendidikan dan Akses Beasiswa untuk Generasi Muda Desa Krebet. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), pp.2584-2589. Available at : <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i7.1285>
- Bourdieu, Pierre. (1990). *The Logic of Practise*. California: Stanford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp.77-101. Available at : <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Maulana, Rofiq (2022). Mengoptimalkan Beasiswa Pendidikan Berkelanjutan di Sekolah Tinggi Pesantren : Mengubah Paradigma Kesejahteraan Dosen. *Jurnal Manajemen Islam dan Pendidikan*. 8(1), pp.43-49. Available at : <http://dx.doi.org/10.30821/benchmarking.v8i1.24473>
- Edo, A. et.al (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga Terhadap Mobilitas Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*. 6(2), pp.317-326. Available at : <https://doi.org/10.71382/sinova.v2i3.175>
- Gottfredson, G. D., & Johnstun, M. L. (2009). John Holland's contributions: A theory-ridden approach to career assistance. *Career Development Quarterly*, 58(2), 99–107. <https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2009.tb00050.x>
- Kristen, U., Wacana, S., Tabuni, N., Tri, S. (2024). Evaluasi Program Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Pegunungan Bintang Menggunakan Model Goal Oriented Evaluation, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), pp.245-259. Available at : <https://doi.org/10.24246/j.jk.2024.v11.i2.p245-259>
- Masduki, E., Asmiyanti, R., Busthom, M., Rizki Rosyari, F., Sri Rahayu, N., (2024). Evaluasi Program Beasiswa Bagi Anak Pelaku Utama Tidak Mampu di Politeknik AUP Jakarta Tahun 2021-2022, *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 6(2), pp.109-117 Available at : <https://doi.org/10.32834/jplan.v6i2.799>

- Maya, N., Dewi, P., & Rahaju, T. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 8(5), pp.1-10. Available at : <https://doi.org/10.26740/publika.v6n6.p%25p>
- Novita, R., et.al (2025). Dukungan Keluarga pada Kelangsungan Pendidikan Remaja di Jorong Koto Tuo Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 9(1), pp.7648-7656. Available at : <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.25736>
- Parsons, Talcott. 1937. *The Structure of Social Action*. New York : McGraw-Hill Book Company.
- Rahman, H., Faisal, M., & Syamsuddin, A. F. (2024). Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbantuan Multimedia Interaktif. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 9(1), pp.12-21. Available at : <https://doi.org/10.47435/jpdk.v9i1.2778>
- Saipul Annur, et.al (2024). Strategi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan yang Efektif dan Berkelaanjutan di Madrasah Indonesia. ABDINE : *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(2), pp.245-250. Available at : <https://doi.org/10.52072/abdine.v4i2.904>
- Setiawan S., Safii, M., & Inawati, I. (2024). Pelatihan dan Pengembangan Desa Melalui Perpustakaan Digital di Desa Miagan Kabupaten Jombang Jawa Timur. ABDINE: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), pp.208-218. Available at : <https://doi.org/10.52072/abdine.v4i2.941>
- Wahyudi, W. (2023). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pendidikan Anak-Anak Desa Terpencil* di Desa Long Kabupaten Malinau. *Jurnnal Pendidikan IPS*, 3(2), pp.53-64. Available at : https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v6i2.4926